



AGENSI PEREMPUAN DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PASCA PERJANJIAN BANGSAMORO DENGAN PEMERINTAHAN FILIPINA (2018-2023)

Rizky Khairun Junior¹ Debbie
Affianty²

¹⁻²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univertsitas Muhammadiyah Jakarta

Article history

Received: 3 Februari 2025

Revised: 10 April 2025

Accepted: 16 April 2025

*Corresponding author

rizky.junior02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran agensi perempuan dalam implementasi perdamaian pasca konflik antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Agensi adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan secara mandiri dan bebas tentang cara mereka hidup, bertindak, dan menjadi sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, internet, buku dan sumber pustaka lainnya, dan analisa konten sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pilar partisipasi menekankan bahwa perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam semua proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Tokoh penting seperti Miriam Coronel Ferrer merupakan salah satu tokoh penting yang terikat dalam pilar partisipasi dan Organisasi perempuan di Filipina seperti We Act 1325, GABRIELA, UnYPhil-Women juga termasuk ke dalam pilar partisipasi. Di pilar perlindungan bertujuan untuk mengatasi sumber konflik dan mencegah kekerasan terhadap perempuan selama konflik. Tokoh penting seperti Irene Santiago adalah salah satu tokoh yang terkait pilar perlindungan. Organisasi perempuan Filipina MCW dan Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro juga termasuk ke dalam pilar perlindungan. Di pilar pencegahan menekankan bahwa perempuan dan anak perempuan harus dilindungi dari kekerasan berbasis gender, terutama selama dan setelah konflik. Tokoh penting seperti Annabelle Abaya yang terikat dalam pilar pencegahan. Organisasi perempuan di Filipina PCW juga termasuk ke dalam pilar pencegahan. Di pilar pemulihan berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan selama pemulihan dan rehabilitas pasca-konflik. Organisasi perempuan di Filipina Tiyakap Kalilintad terlibat dalam pilar pemulihan.

Kata Kunci: Agensi Perempuan, Konflik Bangsamoro dan Pemerintah Filipina, Perdamaian, Women peace security.

Abstract

This study aims to examine the role of women's agency in the implementation of post-conflict peace between Bangsamoro and the Philippine government. Agency is a person's ability to make decisions independently and freely about how they live, act, and become in accordance with their own values and desires. The research method used is a qualitative method with secondary data obtained from journals, the internet, books and other library sources, and content analysis as a data analysis technique. The results of the study show that the participation pillar emphasizes that women must actively participate in all decision-making processes related to peace and security. Important figures such as Miriam Coronel Ferrer are one of the important figures bound by the participation pillar and women's organizations in the Philippines such as We Act 1325, GABRIELA, UnYPhil-Women are also included in the participation pillar. The protection pillar aims to address sources of conflict and prevent violence against women during conflict. Important figures such as Irene Santiago are one of the figures related to the protection pillar. Philippine women's organizations MCW and Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro are also included in the protection pillar. The prevention pillar emphasizes that women and girls must be protected from gender-based violence, especially during and after conflict. Key figures such as Annabelle Abaya are involved in the prevention pillar. Philippine women's organization PCW is also included in the prevention pillar. The recovery pillar deals with the specific needs of women during post-conflict recovery and rehabilitation. Philippine women's organization Tiyakap Kalilintad is involved in the recovery pillar.

Keywords: Women's Agency, Bangsamoro Conflict and Philippine Government, Peace, Women peace security.

Copyright © 2025 Author. All rights reserved

PENDAHULUAN

Agensi adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan secara mandiri dan bebas tentang cara mereka hidup, bertindak, dan menjadi sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka sendiri (Queensland, 2023). Agensi mengacu pada perbuatan. Apapun yang diperbuat oleh seseorang meskipun tanpa didasari oleh maksud-maksud tertentu atau kesengajaan, namun menghasilkan dampak dan konsekuensi, maka seseorang itu disebut sebagai agen. Teori agensi juga menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan agen yang menjalankan tujuan maka akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Teori agensi membahas mengenai semua hubungan atau konflik kepentingan antara satu pihak lainnya dimana pihak yang satu tidak melaksanakan instruksi atas perintah pihak kedua (Mahadwartha, 2002). Keterkaitan antara teori agensi dan Feminisme terletak pada fokus keduanya untuk memperjuangkan kemampuan individu, terutama perempuan, dalam membuat keputusan.

Teori Feminisme tentang agensi sebagai otonomi relasional menggantikan gagasan-gagasan kedaulatan yang *problematis*, namun tetap terjerat dalam *preskriptivisme problematis* mengenai cara-cara berbeda yang dipilih perempuan dalam menjalani hidup. Agenda ajudikasi ini diatasi dalam teori agensi feminis sebagai perlawanan yang didasarkan pada gagasan Tindakan emansipatoris yang kurang preskriptif sebagai subversi dari dalam. Hal ini, pada gilirannya, dapat dikritik bahwa perlawanan adalah sebuah keasyikan khas Barat yang mengarah pada pengabaian etnosentris terhadap jenis agen aktif lainnya dimana perempuan dalam masyarakat non sekuler menciptakan identitas yang bermakna bagi diri mereka sendiri di dalam, bukan melawan, norma-norma budaya yang dominan (Mcnay, 2015). Keterkaitan antara teori feminis dan agenda *Women Peace and Security* (WPS) terletak pada fokus keduanya dalam memperjuangkan peran dan hak perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan.

Pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 1325 tentang perdamaian dan keamanan perempuan (WPS). Resolusi 1325 meminta semua pihak untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan memasukan perspektif gender dalam semua upaya pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan. Resolusi juga menegaskan kembali peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian, respon kemanusiaan, dan rekonstruksi pasca-konflik (OSAGI, 2024). WPS dan CEDAW berkomitmen untuk memastikan hak-hak perempuan dilindungi dan diperjuangkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perdamaian dan keamanan.

Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ialah suatu wilayah otonom di bagian Filipina Selatan yang dibentuk pada 2019 sebagai hasil dari proses perdamaian yang panjang antara pemerintah Filipina dan kelompok Muslim yang menginginkan otonomi atau kemerdekaan. Sebagai rumah bagi sekitar 4 juta warga Filipina, entitas politik baru Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM)

dibentuk pada bulan Februari 2019, setelah pemungutan suara yang memutuskan untuk mengadopsi Undang-Undang Organik Bangsamoro. Transisi baru ini memberikan kesempatan bersejarah bagi wilayah yang menghadapi banyak masalah setelah puluhan tahun konflik bersenjata. BARMM berada di antara daerah termiskin di negara ini dengan tingkat kemiskinan sebesar 63%. Negara ini memiliki salah satu tingkat kematian bayi dan ibu tertinggi, serta salah satu tingkat harapan hidup terendah. Ini juga termasuk angka yang paling rendah untuk indikator kesehatan reproduksi seperti penggunaan kontrasepsi modern, pelayanan antenatal, pertolongan medis yang terampil, dan akses ke fasilitas kesehatan untuk melahirkan. Pembentukan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) adalah langkah besar menuju perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Mindanao. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat stabilitas dan kemajuan di Filipina Selatan, meskipun menghadapi banyak tantangan (UNFPA, 2024).

National Action Plan on Women, Peace And Security (NAPWPS) adalah rencana sebagai respon Filipina terhadap berbagai instrumen internasional mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Ini mendukung implementasi mandat nasional mengenai perempuan dan kesetaraan gender serta perdamaian dan pembangunan. NAPWPS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan penuh dan berarti perempuan dalam semua aspek perdamaian dan keamanan (Peace Women, 2023). WPHF (Women Peace and Humanitarian Fund) adalah kemitraan antara PBB, masyarakat sipil dan negara negara anggota. Organisasi ini berupaya untuk memobilisasi pendanaan yang sangat dibutuhkan dan pengakuan yang telah diperjuangkan dengan susah payah bagi organisasi-organisasi lokal yang dipimpin perempuan dan hak-hak perempuan di negara-negara yang terkena dampak krisis di seluruh dunia. Salah satu kerja WPHF ialah memberikan dana langsung kepada organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil yang beroperasi di daerah-daerah yang terkena dampak konflik dan krisis kemanusiaan (Conciliation Resources, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran agensi perempuan dalam mendukung proses implementasi perdamaian pasca-perjanjian antara pemerintah Filipina dan kelompok Bangsamoro pada tahun 2018–2023, dengan menyoroti kontribusi perempuan dalam empat pilar Women, Peace and Security (WPS): partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi organisasi, tokoh perempuan, serta kebijakan pemerintah Filipina yang berperan dalam memperkuat posisi perempuan dalam proses perdamaian pasca-konflik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah tersedia seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, buku, berita daring (online), dan dokumen resmi.

Objek dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen tertulis yang membahas tentang agensi perempuan dalam perdamaian pasca-perjanjian Bangsamoro antara tahun 2018 hingga 2023. Kriteria inklusi dalam pengumpulan data meliputi: (1) jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review dan membahas isu perempuan, perdamaian, atau Bangsamoro; (2) berita daring dari media terpercaya yang memuat laporan tentang aktivitas organisasi perempuan atau tokoh perempuan terkait isu perdamaian di Filipina; dan (3) laporan dari organisasi internasional atau LSM yang aktif dalam agenda Women, Peace and Security (WPS).

Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel populer atau opini yang tidak berbasis data/fakta; (2) sumber yang tidak menyebutkan tanggal dan kredibilitas penulis atau lembaga; dan (3) dokumen yang tidak relevan secara tematik maupun temporal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data yang dianggap paling relevan dan kredibel untuk menjawab fokus penelitian. Waktu pengumpulan data dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober 2023. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, untuk mengidentifikasi pola, makna, dan representasi peran agensi perempuan dalam konteks pasca-konflik Bangsamoro.

Langkah-langkah penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan penelitian terdahulu atau literature review.
2. Mengumpulkan sumber data penelitian.
3. Menganalisa data penelitian dengan teori-teori yang telah dipilih.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (content analysis), yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan makna dari isi teks yang bersifat kualitatif, khususnya yang berkaitan dengan narasi peran agensi perempuan dalam proses perdamaian pasca-konflik Bangsamoro.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan empat pilar WPS (partisipasi, perlindungan, pencegahan, pemulihan);
2. Kategorisasi, yakni mengelompokkan informasi berdasarkan aktor (tokoh atau organisasi), konteks (peran perempuan dalam kebijakan atau aksi), serta pilar WPS yang diwakili;
3. Interpretasi, yaitu menafsirkan peran-peran tersebut dalam konteks agensi perempuan dan dinamika perdamaian di Filipina;
4. Verifikasi dan validasi, yaitu membandingkan data antar-sumber dan menilai konsistensi serta kredibilitas sumber dengan metode triangulasi sumber.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola kontribusi perempuan dalam menjaga perdamaian, serta memahami sejauh mana kebijakan dan struktur sosial mendukung agensi perempuan dalam konteks pasca-konflik.

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah Bangsamoro

Bangsamoro terletak di Selatan Negara Filipina tepatnya berada di Mindanao Negara Filipina, wilayah Filipina secara geografis terbagi dua wilayah kepulauan besar, yaitu utara dengan kepulauan Luzon dan gugusannya serta Selatan dengan kepulauan Mindanao dan gugusannya. Muslim Moro atau lebih dikenal dengan Bangsamoro adalah komunitas Muslim yang mendiami kepulauan Mindanao-Sulu beserta gugusannya di Filipina bagian Selatan menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2010, populasi Muslim di Filipina diperkirakan sekitar 5,6% dari total populasi. Namun, pada tahun 2012, Komisi Nasional Muslim Filipina (National Commission on Muslim Filipinos, atau NCMF) memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya adalah sekitar 11%. Sebagian besar penduduk Muslim tinggal di Mindanao Palawan, dan Kepulauan Sulu. (Ivan, 2012).

Moro adalah nama yang biasa digunakan oleh kelompok etnolinguistik Muslim Filipina. Ketika penjajah Spanyol menjajah Filipina pada abad ke-16, mereka menggunakan istilah "Moro" untuk menyebut orang Muslim di Spanyol dan Afrika Utara. Sebelum kedatangan Spanyol, orang Moro memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan beberapa kerajaan dan kesultanan yang berkembang pesat, seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Mereka juga memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, Indonesia, dan Arab, yang membawa Islam ke wilayah tersebut. Meskipun sensus tahun 2010 memperkirakan sekitar 5,6 persen penduduknya adalah Muslim, Komisi Nasional Muslim Filipina memperkirakan pada tahun 2012 jumlah sebenarnya adalah sekitar 11 persen dari jumlah penduduk. Mayoritas umat Islam tinggal di pulau Selatan Mindanao serta Palawan dan Kepulauan Sulu. Banyak yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim Moro, yang wilayah tradisionalnya berada di Mindanao (Minority Rights Group, 2023).

Kondisi Ekonomi Bangsamoro

Perekonomian Bangsamoro sangat penting dalam upaya pemulihan dan pengembangan setekah konflik yang panjang, sektor pertanian, perikanan dan sumber daya alam lainnya memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan, tetapi pertumbuhannya masih terbatas. Hambatan utama adalah ketidakstabilan politik, masalah keamanan, dan infrastruktur yang terbatas dibandingkan dengan daerah lain di Filipina, kemiskinan tinggi di Bangsamoro. Selain itu, ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan harus diatasi. Sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun, infrastruktur di Bangsamoro masih terbatas, dan diperlukan pengembangan tambahan untuk

meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Untuk dapat meningkatkan keamanan, ekonomi dan kualitas pendidikan serta perpolitikan, Bangsamoro juga harus Bersatu padu untuk bekerja sama. Itu sangat penting agar Filipina yakin bahwa keputusannya benar, yang memungkinkan Moro untuk memiliki pemerintahan otonom. Secara keseluruhan, perekonomian Bangsamoro memiliki banyak potensi untuk pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Tujuan Bangsamoro dapat dicapai dalam waktu yang lebih lama dengan komitmen yang kuat dari pemerintah Filipina, dukungan internasional, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal Bangsamoro. Bangsamoro adalah wilayah yang sedang berkembang yang mungkin mendapatkan manfaat dari kerja sama yang lebih baik. Selain itu, dengan menjadi tempat yang damai untuk kegiatan ekonomi di sekitar perbatasan. Namun, jika BARMM gagal mengentikan kekerasan dan mendorong kemajuan bagi masyarakatnya, koridor maritim Bangsamoro tidak hanya akan menjadi peluang yang terlewatkan tetapi juga dapat berubah menjadi konflik regional yang mengerikan (Engelbrecht, 2021).

Pada Juli 2020, Otoritas Transisi Bangsamoro menyetujui rencana pembangunan awal Wilayah Otonomi Bangsamoro di Daerah Muslim Mindanao Filipina, yang telah menghancurkan ekonominya karena perang. Wilayah ini, yang mencakup bagian barat daya pulau Mindanao merupakan wilayah Filipina yang paling miskin, Selama bertahun-tahun, konflik antara pemerintah Filipina dan kelompok separatis Moro telah mempertahankan kekuatan ekonominya. Perjanjian Komprehensif Bangsamoro tahun 2014 yang ditandatangani di Manila dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) memutuskan untuk membawa perdamaian dan otonomi politik bagi 4,2 juta orang yang tinggal di wilayah itu. Berdasarkan perjanjian ini, rencana pembangunan Bangsamoro akan dirancang, Sebagian besar, MILF telah gencatan senjata dengan pemerintah sejak 2014. Namun, militan Negara Islam sedang melakukan aksi terpisah terhadap pendukung Moro dan pemerintah Filipina. Pada tahun 2017, kota Marawi menjadi tempat pertempuran berbulan-bulan antara militant Negara Islam. Rabena adalah seorang peneliti di Asia-Pacific Pathways to Progress, kelompok cendekiawan kebijakan luar negeri yang berbasis di Manila yang mendukung partisipasi global untuk membantu keberhasilan perjanjian pembangunan. Rencana pembangunan Bangsamoro, yang terdiri dari 336 halaman, menunjukkan bahwa perdagangan adalah salah satu bagian penting dari pemulihan ekonomi Bangsamoro. Perdagangan menawarkan peluang yang lebih baik untuk penciptaan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi, terutama untuk provinsi pulau yang dekat dengan Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi Angkatan kerja hingga 50% pada tahun 2022 dengan berkonsentrasi pada sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya. Pembangunan agresif sektor pertanian dan perikanan akan mendongkrak potensinya, menjadi penyumbang terbesar, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari pandem yang berlangsung, Bangsamoro, wilayah Filipina Selatan dengan mayoritas penduduk Muslim yang otonomi, menyetujui 4.740 pendaftaran nama bisnis pada kuartal pertama 2021, dibandingkan dengan 1.251 pendaftaran bisnis pada tahun 2020, investasi dan

pariwisata melonjak tiga kali lipat. Dari Januari hingga Maret tahun ini, menghasilkan senilai PHP423 Juta dan lapangan kerja untuk 10.109 orang (Hammond, 2020).

Sejarah Konflik Mindanao dan Filipina

Konflik Mindanao adalah konflik lama yang melibatkan penduduk Mindanao dan penduduk di luar Mindanao. Dinamika konflik ini berawal dari perlawanan penduduk Mindanao terhadap upaya yang dilakukan oleh penduduk di luar Mindanao. Kolonisasi oleh Spanyol, berhasil menguasai Kepulauan Luzon dan bermaksud untuk memperluas pengaruhnya ke bagian selatan Luzon pada abad ke-15. Setelah itu, konflik Mindanao kembali muncul dengan cepat saat rezim kolonial Spanyol beralih ke Amerika Serikat menjelang Perang Dunia Kedua. Sikap etnis orang Mindanao terhadap Amerika Serikat berbeda dengan sikap rezim kolonial Spanyol. Amerika Serikat mungkin tidak mempermasalahkan identitas Islam sebagai identitas kultural yang harus diganti dengan identitas baru, seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Spanyol (Reskianti, 2014).

Konflik selama lebih dari enam puluh tahun di Filipina Selatan, antara pemerintah dan kelompok separatis, menjadikan Mindanao dan Kepulauan Sulu sebagai wilayah yang rawan kekerasan. Mindanao yang terorganisir bersama sebelum menjadi front persatuan yang lebih kuat (Engelbrecht, 2021). Konflik antara komunitas Muslim Mindanao dengan komunitas etnis Visayas atau Filipino yang melakukan politik migrasi kearah selatan. Perpindahan penduduk ini menjadi masalah serius takala sekelompok etnis Filipino dengan dibantu oleh pasukan Filipina melakukan politik genocide di awal dekade 1970-an. Masyarakat Moro mempunyai pandangan yang negatif terhadap kelompok Filipino dan pemerintah Filipina. Mereka mengidentifikasi kelompok tersebut sebagai kelompok penginjil yang akan mencabut keberagaman sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rezim kolonial Spanyol (Berutu, 2019).

Upaya Penting Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Filipina

Berbagai upaya perdamaian dan rekonsiliasi telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk melawan masalah pemberontakan yang sudah berlangsung lama di Filipina. Proses-proses ini telah menghasilkan kontribusi berharga dari para pekerja perdamaian perempuan Filipina, yang memperjuangkan undang-undang dan reformasi penting yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan dan memperluas pekerjaan mereka di sektor keamanan. Undang-undang dan reformasi ini juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berdiri di garis depan dengan peran sentral, dan pada saat yang sama memberi nilai pada pekerjaan reproduksi dan komunitas yang dilakukan perempuan di wilayah yang dilanda konflik. (Editorial FES Asia, 2022).

Di dunia yang terkoyak dan terancam oleh peperangan, memperjuangkan dan mempertahankan perdamaian adalah keharusan. Banyaknya komunitas yang dilanda konflik, perempuan telah mampu menyelesaikan konflik, menyembuhkan, dan mengasuh karena peran gender mereka. Namun, mereka biasanya tidak terlibat dalam proses

pengambilan keputusan yang sangat penting untuk menyelesaikan perang dan membangun pemerintahan baru (Ramon Magsaysay Award Foundation, 2023).

Perempuan selalu memainkan peran penting di wilayah yang terkena dampak konflik. Mereka memainkan peran ganda, dan penelitian menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai penerima pasif bantuan atau korban perang, namun sebagai pihak yang memberikan pertolongan pertama, mediator, agen transformasi di masyarakat ketika mereka bekerja di daerah evakuasi di mana mereka juga menjadi bagian dari pengungsian. Partisipasi perempuan dalam resolusi konflik, pengambilan keputusan dan proses pembangunan perdamaian, pencegahan kekerasan seksual dan berbasis gender dalam konflik, promosi perspektif gender dalam pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian, dan rekonstruksi pasca konflik. Perempuan Filipina selalu menjadi peserta aktif di sektor keamanan dan katalis perubahan dalam proses perdamaian. Faktanya, presiden perempuan pertama Filipina, Corazon Cojuangco Aquino, yang mengupayakan proses perdamaian setelah dua dekade berada dalam darurat militer (Editorial FES Asia, 2022).

Kebijakan Pemerintah Filipina

a) NAPWPS

NAPWPS (National Action Plan on Women, Peace, and Security) atau rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Ini adalah salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah yang dirancang oleh negara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan resolusi terkait lainnya tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Evolusi NAPWPS di Filipina lahir dari kebijakan kolaboratif antara masanya, dan pemerintah dalam proses yang statis pada tahun 2007. Selama waktu ini, ada beberapa putaran konsultasi kluster regional yang diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat sipil sebagai poin-poin aksi utama yang akan dimasukkan dalam National Action Plan (NAP). NAPWPS yang dihasilkan diluncurkan pada Maret 2010, setelah penandatanganan Executive Order, BOL 865 yang menciptakan infrastruktur kelembagaan implementasi NAP, Komite Pengarah Nasional untuk perempuan, perdamaian dan Keamanan. NAPWPS 2017-2022 pada dasarnya lepas landas dari temuan studi tentang implementasi NAPWPS 2010-2016, khususnya membangun keuntungannya dan mengatasi kesenjangan. Secara prosedural, penyusunan melibatkan seminar pembaruan dan serangkaian pertemuan kelompok Kerja Teknis National Security Council (NSC) WPS tentang penyempurnaan berkelanjutan dari draf, konsultasi dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan musyawarah dan masukan lebih lanjut dari anggota Komite Eksekutif NSC PS. NAPWPS 2017-2022 menjangkar visinya untuk mencapai perluasan peran perempuan di berbagai ruang untuk perdamaian. Dalam hal ini, menyoroti agensi perempuan baik sebagai pemimpin dan peserta dalam proses perdamaian negara. Proses perdamaian ini berusaha untuk melanjutkan praktik terbaik kehadiran perempuan di meja perdamaian formal serta di ruang informal lainnya. Bertujuan juga untuk mendukung berbagai

inisiatif dimana perempuan memberdayakan perempuan lain. Dan juga NAPWPS memajukan titik aski yang lebih kuat dan strategi yang lebih pasti bagi perempuan di sektor keamanan. Fokusnya bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi perempuan tetapi bertujuan untuk membangun lingkungan kelembagaan yang lebih responsif yang akan membuka ruang bagi mereka sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Implementasi penuh NAPWPS dalam sebuah mekanisme yang relevan di tingkat nasional dan lokal perdamaian dan ketertiban nasional dan subnasional/pembangunan/dewan bencana alam) perumusan dan atau tinjauan kebijakan dan rencana aksi oleh semua NGA yang menerapkan, LGU, dan badan antar lembaga; dan pengembangan program kapasitas komprehensif pada topik WPS yang relevan (Ferrer, 1997).

NAPWPS Filipina terdiri dari dua hasil utama berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 dan 1820:

1. Perlindungan dan pencegahan

Untuk menjamin perlindungan hak asasi perempuan dan pencegahan pelanggaran hak-hak tersebut dalam konflik bersenjata dan situasi pasca-konflik.

2. Pemberdayaan dan Partisipasi

Untuk memberdayakan perempuan dan memastikan partisipasi aktif dan bermakna mereka dalam bidang pemeliharaan perdamaian, penciptaan perdamaian, pembangunan perdamaian, pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan rekonstruksi pasca-konflik.

b) WPHF

WPHF (Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF) adalah Dana Perdamaian dan Kemanusiaan Perempuan PBB, di Filipina, WPHF bermitra dengan LSM internasional untuk mendukung organisasi hak-hak perempuan lokal yang berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam mengadvokasi dan memastikan akuntabilitas komitmen WPS-HA, serta meningkatkan pengambilan keputusan perempuan dalam pencegahan dan respons konflik, WPHF juga menyalurkan pembiayaan yang fleksibel untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam proses pendaftaran badan hukum di Filipina, serta kegiatan penguatan kelembagaan lainnya, seperti mobilisasi sumber daya dan penulisan proposal, untuk memastikan keberlanjutan dan kelangsungan kegiatan mereka (Women's Peace & Humanitarian, 2023).

Dana perdamaian dan Kemanusiaan Perempuan (WPHF) diluncurkan pada bulan Februari 2016 di New York untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, menciptakan sinergi yang lebih besar antara berbagai sumber pendanaan, dan memecahkan kesenjangan antara bantuan kemanusiaan, perdamaian dan keamanan, serta pembangunan. WPHF adalah satu-satunya mekanisme pendanaan global yang didedikasikan khusus untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan aksi kemanusiaan. WPHF juga menjadi alat pendanaan yang fleksibel dan cepat yang mendukung intervensi berkualitas untuk meningkatkan kapasitas

perempuan lokal dalam mencegah konflik, merespons krisis dan keadaan darurat, dan meraih peluang-peluang penting dalam pembangunan perdamaian. Ini adalah kemitraan inovatif antara negara-negara anggota, PBB, dan masyarakat sipil, dengan seluruh pemangku kepentingan terwakili di Dewan Pendanaan Global. Tujuan utama WPHF adalah mewujudkan masyarakat yang damai dan setara gender di seluruh dunia. Oleh karena itu, WPHF berupaya mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan respons terkait pencegahan konflik dan meningkatkan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan (UN Women, 2021).

c) Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD)

Rencana Pembangunan Responsif Gender (PPGD) Filipina 1995-2025 ini adalah kebijakan nasional yang mencakup berbagai sektor. Pertanian dan perikanan, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta industri perdagangan ini adalah bagian dari rencana pembangunan ekonomi dan industri. Tujuan PPGD ialah untuk memastikan bahwa perspektif gender dimasukkan secara menyeluruh ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi kontribusi baik laki-laki maupun perempuan diperhitungkan secara adil dan seimbang. Dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik, PPGD mendorong mereka untuk mengelola sumber daya dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Rencana sektoral ini memiliki tujuan utama, untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi dan industri baik sebagai agen maupun penerima manfaat dan untuk mengarusutamakan masalah gender dalam pengembangan dan pengelolaan subsektor pertanian, lingkungan hidup, dan sumber daya alam (Food and Agriculture Organization, 2023). Meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, program ini telah membantu meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang di Filipina. Misalnya, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, mengatasi tantangan budaya dan struktural yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya, dalam pembangunan, dan memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk mendukung program PPGD. Rencana Pembangunan Responsif Gender Filipina (PPGD) berfokus pada pembangunan yang adil, berkelanjutan, bebas kekerasan, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), mendukung penentuan nasib sendiri dan aktualisasi potensi manusia, dan mendorong partisipasi. Hal ini menempatkan masyarakat di tengah dan berusaha mencapai pembangunan yang sukses untuk semua kelompok. Namun, hukum mengakui diskriminasi berdasarkan gender kelas, dan etnis. Hal ini menempatkan perempuan sebagai kelompok yang dirugikan karena sejarah ketidakadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, PPGD 1995-2025 berfungsi sebagai landasan strategis bagi pemerintah Filipina untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan (Nayong pilipino foundation ,2024).

Pilar-Pilar Dalam WPS

1) Partisipasi (Participation)

Pilar ini menekankan bahwa perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam semua proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Negara-negara anggota harus memastikan bahwa perempuan lebih banyak terwakili di semua tingkat pengambilan keputusan dalam mekanisme dan lembaga nasional, regional, dan internasional untuk pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik (Asri, 2022).

Miriam Coronel Ferrer merupakan salah satu tokoh penting yang terikat dalam pilar partisipasi dalam WPS, Coronel Ferrer memastikan bahwa perspektif gender dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian, yang merupakan contoh nyata implementasi pilar partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses-proses penting yang berdampak luas bagi masyarakat. Dia terlibat secara aktif dalam masalah politik pada akhir tahun 1970-an, ketika ia menjadi aktivis mahasiswa dan bergabung dengan perlawanan terhadap pemerintahan darurat militer. Dan ia juga seorang akademisi yang berperan penting dalam perundingan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Sebagai wanita pertama di dunia yang mendandatangani perjanjian perdamaian besar, ia juga memainkan peran penting dalam mencapai Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro pada tahun 2014 (Ramon Magsaysay Award Foundation, 2023).

Organisasi perempuan di Filipina seperti We Act 1325, GABRIELA, UnYPhil-Women juga masuk dalam pilar partisipasi. We Act 1325 berperan dalam mengadvokasi pentingnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya melibatkan perempuan dalam perundingan dan pengambilan keputusan. Sedangkan GABRIELA sering berpartisipasi dalam kampanye dan mobilisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah yang mempengaruhi perempuan dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan perdamaian dan keamanan. Sedangkan UnYPhil-Women terlibat dalam proyek dan inisiatif lokal yang mendorong perempuan muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan komunitas dan resolusi konflik. Mereka juga mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya untuk memperkuat perdamaian dan keamanan di tingkat akar rumput.

• Women Engaged in Action on 1325 (WE Act 1325)

We Act 1325 organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang di tetapkan oleh Resolusi 1325 yang ditetapkan ke dalam Tindakan yang memberikan dampak positif pada kehidupan perempuan dan komunitas mereka dalam konteks perdamaian dan keamanan global, serta organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang WE 1325. Jaringan ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk implementasi Resolusi Dewan Keamanan

PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan di Filipina. *Women Engaged in Action* ini diluncurkan pada 17 November 2010 (OSAGI, 2024).

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam banyak situasi konflik dan juga berperan penting dalam pembangunan perdamaian. Namun, mereka seringkali kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Act of We 1325 memastikan bahwa pengalaman dan suara perempuan diperhitungkan dalam solusi perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Melalui upaya mereka, Act of We 1325 mendorong kebijakan pengembangan dan program yang lebih inklusif dan fokus pada kebutuhan perempuan dalam situasi konflik. Act of We 1325 memastikan bahwa pengalaman dan suara perempuan diperhitungkan dalam solusi perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Melalui upaya Act of We 1325 mendorong kebijakan pengembangan dan program yang lebih inklusif dan fokus pada kebutuhan perempuan dalam situasi konflik (Maligaling, 2024). Organisasi We Act 1325 ini terkait dalam salah satu pilar dari WPS yaitu partisipasi.

- **GABRIELA (General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action).**

GABRIELA adalah jaringan organisasi perempuan yang mempromosikan hak-hak perempuan dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian. Didirikan pada tahun 1984, GABRIELA mengorganisir perempuan Filipina, terutama dari sektor masyarakat yang terpinggirkan, dan membantu mendidik dan memberdayakan mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka melalui aksi kolektif. GABRIELA mencita-citakan masyarakat berdaulat yang bebas dari dominasi dan intervensi asing dengan perekonomian mandiri yang diarahkan pada kebutuhan rakyat dan memberikan nilai setara terhadap peran perempuan dalam produksi. Dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin serta partisipasi politik, perempuan terjamin dan sistem sosial budaya yang tidak mengandung nilai-nilai patriarki, memikirkan gender, diskriminasi, dan kekerasan (GABRIELA, 2024).

- **United Youth of Philippines-Women, Inc (UnYPhil-Women)**

UnYPhil-Women adalah organisasi nirbala perempuan-pemuda yang terdaftar di SEC (security and Exchange Commission) pada tahun 2004. UnYPhil didirikan pada tahun 1990 dan memiliki cabang di Luzon dan Mindanao. Dibentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketidakadilan gender dan mempromosikan peran perempuan muda dalam proses perdamaian. Organisasi ini berasal dari upaya beberapa perempuan muda yang menyadari dampak konflik terhadap komunitas mereka dan melihat betapa pentingnya perempuan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian. Baru pada tahun 2004, UnYPhil-Women, sebuah cabang khusus di Mindanao, didirikan di Kota Cotabato. Tujuan utama bantuan UnYPhil-Women adalah untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan, kekerasan seksual dan fisik, perdagangan manusia, dan diskriminasi lainnya, untuk mendukung hak-hak perempuan dan

perlindungan mereka terhadap kekerasan, untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan perdamaian, untuk mendorong pemberdayaan mereka melalui pendidikan, peningkatan kapasitas, dan mata pencaharian, dan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa harga diri di kalangan perempuan melalui integrasi sosial dan kepercayaan diri. UnYPhil-Women membayangkan sebuah komunitas di mana perempuan Bangsamoro, dipandu oleh prinsip yang dihormati oleh masyarakat, menjadi perencana dan pengambil keputusan yang aktif dalam pembangunan perdamaian menuju masyarakat yang adil dan manusiawi. Masyarakat ini menumbuhkan etika di antara berbagai kelompok etnis, yang menghasilkan persatuan yang dibangun atas dasar rasa hormat terhadap berbagai budaya, agama, dan tradisi. Dengan mempertimbangkan efek psikologis konflik, UnYPhil-Women menawarkan dukungan psikososial untuk membantu perempuan dan pemuda yang terkena dampak konflik memperbaiki dan membangun kembali kehidupan mereka, selain itu, organisasi ini membantu komunitas mengembangkan sistem dukungan yang dapat membantu orang yang mengalami trauma dan stress yang disebabkan oleh konflik (UnYPhil-Women, Inc, 2024). Organisasi UnYPhil-Women ini terkait dalam salah satu pilar dari WPS yaitu Partisipasi.

2) Perlindungan (Protection)

Pilar ini bertujuan untuk mengatasi sumber konflik dan mencegah kekerasan terhadap perempuan selama konflik. Meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengambil tindakan khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, terutama pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari semua jenis kekerasan lainnya yang terjadi selama konflik bersenjata, termasuk dalam keadaan darurat dan kemanusiaan (Asri, 2022).

Irene Santiago adalah salah satu tokoh yang terkait salah satu pilar dalam WPS yaitu perlindungan. Santiago berperan penting dalam memastikan bahwa isu-isu gender dan perlindungan dimasukkan ke dalam kebijakan dan program perdamaian di Filipina, dan telah memastikan bahwa perlindungan perempuan menjadi prioritas dalam agenda perdamaian. Ia juga memiliki pengalaman pribadi yang signifikan dalam perundingan perdamaian. Selain itu, pada tahun 1995, dia memimpin Forum LSM tentang perempuan di Tiongkok, yang merupakan acara pendamping untuk perundingan perdamaian (Reilly, 2015).

Organisasi perempuan Filipina MCW dan Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro juga berpartisipasi dalam pilar perlindungan. MCW menawarkan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan, termasuk pusat krisis dan layanan konseling. MCW juga berperan dalam mengembangkan dan mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung perlindungan perempuan dan anak-anak. Sedangkan Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro menyediakan layanan langsung kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk layanan kesehatan, konseling, dan dukungan hukum. Ini membantu

memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

• **Mindanao Commission on Women (MCW)**

Organisasi yang didirikan di Mindanao Commission on Women (MCW) bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan mendukung upaya perdamaian di wilayah tersebut. MCW sangat memperjuangkan hak-hak perempuan dan menangani ketidakadilan gender, khususnya di Mindanao, yang memiliki keragaman budaya dan etnis, serta tantangan konflik dan kemajatan ekonomi. MCW menggunakan pendekatan yang menggabungkan “lebih banyak orang dan orang penting”: menggabungkan perempuan ke dalam lingkaran perdamaian di seluruh Mindanao, mengadakan pertemuan tahunan kelompok-kelompok ini, dan memilih perempuan untuk peran penting dalam proses perdamaian. Oleh karena itu, seorang kandidat MCW tidak hanya berpartisipasi dalam perundingan dengan pemerintah dari tahun 2001 hingga 2010, tetapi juga terus terlibat dengan gerakan perdamaian dan perempuan di Mindanao, dan mendapat dukungan dari kelompok perempuan. Selain itu, banyak upaya untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang undang-undang nasional dan internasional yang relevan (Santiago, 2015).

• **Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro, Inc**

Nisa Ul Haqq Fi Bangsamoro, Inc adalah organisasi nirbala yang berbasis di Filipina, khususnya di wilayah Bangsamoro. Fokus utama organisasi ini adalah pemberdayaan perempuan Muslim di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mendukung hak-hak perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembangunan komunitas dan proses perdamaian, mengembangkan kemampuan dengan menggunakan gender dalam Islam sebagai kerangka untuk memberdayakan perempuan, membuat dan mengembangkan kebijakan yang sensitif dan responsif terhadap budaya dan gender untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam emansipasi di tempat kerja, di rumah, dan di ruang publik lainnya serta memperkuat partisipasi perempuan dalam proses dan mediasi perdamaian. (WPS ASEAN, 2024).

3) Pencegahan (Prevention)

Pilar ini menekankan bahwa perempuan dan anak perempuan harus dilindungi dari kekerasan berbasis gender, terutama selama dan setelah konflik. Mereka juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik serta dalam pembangunan perdamaian, dan bahwa mereka harus berpartisipasi secara sama rata dan sepenuhnya dalam semua upaya untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan (Asri, 2022).

Annabelle Abaya salah satu tokoh penting perempuan yang terikat dalam pilar WPS yaitu pencegahan. Annabelle Abaya bekerja untuk mencegah eskalasi konflik melalui mediasi dan fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Upaya Abaya

dalam mengadvokasi pencegahan kekerasan dan mempromosikan perdamaian menunjukkan komitmennya terhadap tujuan pilar pencegahan dalam kerangka WPS. Di Filipina, Belle dikenal sebagai “Bunda Perdamaian dan Mediasi”. Dia menghabiskan hidupnya untuk mempromosikan pentingnya komunikasi terbuka dan mengajarkan filosofi yang sama kepada generasi baru mediator di Filipina. Belle adalah orang yang melakukan banyak hal, salah satunya adalah mendirikan The Conflict Resolusi Group (CoRe), sebuah yayasan yang berfokus pada proses penyelesaian konflik yang tidak melibatkan permusuhan. Ia ditunjuk sebagai Sekretaris Kantor Penasihat Presiden untuk proses perdamaian Filipina pada tahun 2009.

Organisasi perempuan di Filipina PCW berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan ini dengan mendukung, mendidik, dan mendorong pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. PCW terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mencegah kekerasan terhadap perempuan. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan nasional mendukung perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

• **Philippine Commission on Women (PCW)**

Komisi Perempuan Filipina adalah badan pengambil kebijakan dan koordinator utama serta program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sebagai badan pengawas permasalahan perempuan, PCW bertindak sebagai katalisator pengarusutamaan gender, otoritas dalam permasalahan perempuan, dan pendukung utama pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan kesetaraan gender di negara ini (PCW, 2024). Meskipun tidak ada kebijakan atau undang-undang yang menangani masalah menyalahkan korban, Komisi Perempuan Filipina dalam menghilangkan sikap menyalahkan korban di media sosial untuk membantu masyarakat mengenali dan mengurangi sikap menyalahkan korban terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. PCW memberikan saran kepada pemerintah tentang isu-isu gender dan membangun kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Selain itu, PCW berkontribusi pada pengesahan beberapa undang-undang dan kebijakan penting yang melindungi hak-hak perempuan, seperti Magna Carta of Women dan Anti-Violence Against Women and Their Children Act. PCW telah menjadi tokoh penting dalam perubahan di Filipina dengan misinya yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Ini telah mempengaruhi kebijakan nasional dan memungkinkan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. (Sharae, Gabito, 2022). Organisasi PCW ini terkait dalam salah satu pilar dari WPS yaitu pencegahan.

4) Pemulihan (Relief and Recovery)

Pilar ini berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan selama pemulihan dan rehabilitasi pasca-konflik. Meminta kemajuan dalam bantuan dan pemulihan untuk

mengatasi krisis internasional melalui lensa gender, termasuk dengan menghormati masyarakat sipil dan kemanusiaan (Asri, 2022).

Organisasi perempuan di Filipina Tiyakap Kalilintad terlibat dalam program pemulihan dan rehabilitasi yang membantu perempuan yang terkena dampak konflik dengan bantuan ekonomi, sosial dan psikologis. Mereka juga bekerja untuk memastikan bahwa program pembangunan pasca-konflik mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Tiyakap Kalilintad terlibat dalam upaya membantu komunitas di Mindanao yang rusak oleh konflik /Rehabilitasi. Mereka membantu membangun kembali infrastruktur, menyediakan tempat tinggal, dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Organisasi ini juga mendidik perempuan dan anak-anak di komunitas pasca-konflik. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke pendidikan yang baik dan pelatihan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

• Tiyakap Kalilintad (Care for Peace)

Tiyakap Kalilintad adalah organisasi non, saham, nirbala, berbasis hak yang terdiri dari penjaga perdamaian lokal sipil. Tiyakap Kalilintad dibentuk oleh sekelompok perempuan di Mindanao yang menyadari dampak konflik berkepanjangan terhadap komunitas mereka, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Organisasi ini melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang etnis dan agama dalam workshop, dialog antar-kelompok dan proyek rekonsiliasi. Mereka juga memberikan dukungan psikososial bagi perempuan yang mengalami trauma akibat konflik. Organisasi ini dibentuk untuk membantu menghentikan permusuhan dan memperkuat pembangunan perdamaian akar rumput di daerah yang rawan konflik. Selain itu, dengan mengadopsi hukum internasional tentang perlindungan sipil, tujuannya adalah untuk setidaknya mengurangi, jika tidak menghilangkan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRV) selama konflik bersenjata (Tiyakap Kalintad, 2024). Organisasi Tiyakap Kalilintad ini terkait dalam salah satu pilar dari WPS yaitu pemulihan.

Upaya Perempuan Muda untuk Mengambil Bagian Dalam Proses Perdamaian dan Sektor Keamanan

Perempuan Filipina muda secara aktif terlibat dalam perdamaian dan keamanan. Mereka menunjukkan bahwa mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai dengan berpartisipasi dalam proses negosiasi perdamaian, mendukung kebijakan, memberi pendidikan perdamaian, dan bergabung dengan pasukan keamanan. Dukungan yang lebih besar dan pengakuan atas pekerjaan mereka akan membantu memperkuat upaya perdamaian dan keamanan di Filipina dan di seluruh dunia. Penting untuk mengenali pengalaman perempuan muda di daerah yang terkena dampak konflik. Hal ini termasuk mengembangkan program yang memadai untuk menanggapi situasi mereka, dan memungkinkan suara mereka didengar dalam berbagai proses yang terlibat dalam mengatasi permasalahan mereka. Jadikan mereka peserta aktif dalam membangun

kembali komunitas mereka. Jika peran dan suara kepemimpinan mereka didorong, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di tempat yang lebih besar di mana mereka dapat membawa agenda perdamaian (Editorial FES Asia, 2022).

Perempuan dari berbagai latar belakang, etnis dan agama telah memainkan peran penting dalam membentuk kelompok masyarakat sipil dan secara proaktif terlibat dalam kegiatan pembangunan perdamaian di komunitas lokal mereka. Mereka telah berkontribusi pada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan dengan membentuk kelompok masyarakat sipil, terlibat dalam proyek pembangunan perdamaian, dan berpartisipasi dalam proses perdamaian formal dan informal. Kontribusi perempuan dalam pembangunan perdamaian terus menunjukkan bahwa mereka adalah pemangku kepentingan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai, meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Perjuangan untuk perdamaian adalah sebuah kesempatan bagi kita, sebagai perempuan, untuk mendefinisikan kembali peran dan hubungan kita sebagai individu, dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan harus berperan dalam memahami dan mengatasi semua tantangan yang dihadapi BARMM. Untuk melakukan hal ini, perempuan harus mempunyai posisi formal di setiap tingkat daerah otonom dan pemerintahannya sambil memastikan bahwa anak perempuan Bangsamoro memiliki akses terhadap pendidikan serta peluang yang diperlukan untuk berhasil dalam posisi tersebut di masa depan. Bersama-sama, perempuan Bangsamoro akan bekerja sama untuk membangun perdamaian dan melawan ketidakadilan (Adam, 2022).

Memposisikan Inklusi Perempuan dalam Perundingan Perdamaian

Memposisikan perempuan sebagai bagian dari perundingan perdamaian di Filipina bukan hanya masalah keadilan gender tetapi juga strategi yang sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif yang dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang damai dan adil bagi semua, dengan mengakui dan mendukung peran penting dalam semua tahap proses perdamaian, dari negosiasi formal hingga inisiatif akar rumput. Perempuan sering kali mengalami dampak konflik dengan cara yang berbeda dengan laki-laki, terutama karena mereka sering menjadi korban kekerasan berbasis gender dan pemindahan paksa. Pengalaman ini memberi mereka wawasan khusus tentang kebutuhan komunitas yang sering terabaikan oleh proses perundingan yang didominasi laki-laki. Lebih dari satu dekade setelah diadopsinya UNSCR 1325 menjadikan perempuan sangat penting partisipasi dalam semua aspek pemeliharaan perdamaian, penciptaan perdamaian, dan pembangunan perdamaian, perempuan terus melakukannya menjadi kelompok pemangku kepentingan terbesar yang suaranya tidak didengar dalam proses negosiasi resmi. Perempuan harus dilibatkan dalam perundingan perdamaian untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil. Meskipun ada kemajuan besar sejak UNSCR 1325 diadopsi, perempuan masih sering menjadi pemangku kepentingan dalam proses perdamaian formal yang tidak didengarkan. Kasus Bangsamoro menunjukkan betapa pentingnya

peran perempuan dalam membangun perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan (Arino, 2010 ; UN Women, 2018). Untuk menjamin partisipasi penuh dan signifikan perempuan dalam proses perdamaian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan struktural, budaya, dan keamanan yang dihadapi oleh mereka. Upayanya yaitu:

A. Perubahan Struktural untuk Melibatkan Perempuan dalam Proses Perdamaian

Posisi Perempuan berada di luar platform pengambilan keputusan tertantang. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran perempuan dalam proses perdamaian bukan disebabkan oleh hal tersebut karena kurangnya pengalaman mereka dalam penyelesaian konflik atau negosiasi, namun karena kurangnya upaya untuk melakukannya mengintegrasikannya ke dalam proses perdamaian formal. UNSCR 1325 menjunjung tinggi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam perdamaian negosiasi. Menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi perempuan memerlukan reformasi kebijakan, penguatan kapasitas, dukungan kelembagaan, dan dukungan keuangan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Pengalaman Bangsamoro menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan dan inklusi jika mereka berkomitmen dan bertindak dengan benar (UN Women, 2012). Oleh karena itu, perubahan struktural untuk melibatkan perempuan dalam proses perdamaian masuk kedalam salah satu pilar dari WPS yaitu partisipasi.

B. Perempuan Mendorong Dialog dan Membangun Kepercayaan

Di berbagai tahapan proses perdamaian di Filipina, perempuan telah memainkan peran penting dalam mendorong diskusi dan membangun kepercayaan. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam perundingan resmi, tetapi mereka juga memimpin komunitas, membantu kelompok berbicara, dan menjaga perdamaian di tingkat lokal. Perempuan sering dianggap oleh pihak yang berperang sebagai perantara yang jujur dalam proses perdamaian, dan mereka bertindak sesuai dengan hal tersebut. Pihak-pihak yang berkonflik mungkin menganggap perempuan tidak terlalu mengancam karena mereka biasanya bertindak di luar struktur kekuasaan formal dan umumnya tidak dianggap memobilisasi kekuatan tempur. Hal ini memberikan perempuan akses terhadap pihak-pihak yang berkonflik, yang sering kali tidak diberikan kepada pemimpin laki-laki. Perempuan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas, dari peran mereka sebagai fasilitator dialog hingga inisiatif akar rumput. Dengan terus mendukung dan memperluas peran mereka, proses perdamaian di Filipina dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (Relly, 2015). Oleh karena itu, perempuan mendorong dialog dan membangun kepercayaan masuk kedalam salah satu pilar WPS yaitu pencegahan.

C. Perempuan Menjembatani Perpecahan dan Memobilisasi Koalisi

Perempuan Filipina telah menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjembatani konflik dan menggerakkan koalisi untuk perdamaian. Perempuan membantu menciptakan jembatan antara kelompok yang bertikai dan memobilisasi dukungan untuk perdamaian yang berkelanjutan melalui peran mereka sebagai fasilitator dialog, pemimpin komunitas, dan advokat kebijakan. Untuk memperkuat peran perempuan ini dan memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses perdamaian di Filipina, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dan strategis. Perempuan sering memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat, bekerja melintasi kesenjangan etnis, agama, politik, dan budaya yang terpecah akibat konflik. Dan ia juga mahir membangun koalisi dalam mendorong perdamaian. Selain membangun jembatan horizontal, perempuan juga menjembatani kesenjangan vertikal antara elit dan masyarakat akar rumput, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang perdamaian akan bertahan dengan mendorong dukungan dan menghasilkan legitimasi (Relly, 2015). Oleh karena itu, perempuan menjembatani perpecahan dan memobilisasi koalisi masuk kedalam salah satu pilar dalam WPS yaitu partisipasi.

D. Perempuan Mengangkat Isu-Isu yang Penting bagi Perdamaian

Perempuan Filipina memainkan peran yang signifikan dalam mengangkat berbagai masalah yang sering terabaikan dalam proses perdamaian. Perempuan memastikan bahwa proses perdamaian mencakup perspektif yang lebih luas dan merespon kebutuhan nyata masyarakat, dari advokasi untuk hak asasi manusia dan keadilan ekonomi hingga integrasi isu-isu lingkungan dan representasi gender. Proses perdamaian di Filipina dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan jika mereka terus mendukung dan memperluas fungsi mereka. Seperti halnya laki-laki, perempuan memainkan berbagai peran selama konflik, mulai dari pembuat perdamaian dan pendukung politik hingga korban dan pelaku. Meskipun demikian, rata-rata perempuan mengalami konflik dengan cara yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perempuan cenderung tidak mengangkat senjata, namun jumlah korban meninggal lebih tinggi akibat dampak tidak langsung perang-rusaknya, tatanan sosial, pelanggaran hak asasi manusia penyebaran penyakit menular, dan kehancuran ekonomi (Relly, 2015). Oleh karena itu, perempuan mengangkat isu-isu yang Penting bagi Perdamaian masuk kedalam salah satu pilar WPS yaitu partisipasi.

Wanita dalam Perjanjian Keamanan dan Kepimpinan

Wanita dipandang sebagai pemimpin formal oleh banyak orang karena penampilannya yang berbeda dengan laki-laki. Namun, keraguan ini dapat diatasi dengan keterampilan dan pencapaian mereka. Kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki mencapai tujuan yang sama. Kemampuan wanita untuk memimpin telah terbukti berulang kali melalui keterampilan, pencapaian, dan gaya kepemimpinan yang mereka gunakan. Semakin banyak orang melihat peran perempuan dalam perjanjian keamanan

dan kepemimpinan sebagai komponen penting dalam membangun masyarakat yang damai dan stabil keterlibatan perempuan dalam bidang ini tidak hanya mengubah perspektif tetapi juga memastikan bahwa upaya keamanan dan perdamaian berhasil dan bertahan lama. Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) tahun 2012 mengaskan bahwa wanita harus terlibat secara inklusif dalam perjanjian perdamaian sebelum perjanjian Comprehensiv Agreement on the Bangsamoro (CAB) ditandatangani pada tahun 2014. Penegasan ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan Filipina untuk merealisasikan dan menterjemahkan NAP melalui perundingan dan undang-undang. Di bawah pentadbiran dan kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III, peranan wanita dalam rundingannya damai telah melalui fasa pengukuhan yang memberangsangkan. Komitmen terhadap keterlibatan wanita, melalui FAB, pemerintah Filipina secara jelas menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa wanita terlibat secara aktif dan inklusif dalam proses perdamaian. Langkah ini merupakan bagian dari usaha untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakui peran penting wanita dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Implementasi Rencana Aksi Nasional, pemerintah Filipina telah menerapkan National Action Plan (NAP) yang bertujuan untuk mendorong wanita untuk dimasukkan dan terlibat dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Rencana ini mencakup penerapan prinsip-prinsip Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian, dan Keamanan. Secara keseluruhan, selama pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan peran wanita dalam perundingan damai di Bangsamoro merupakan tonggak penting dalam mendukung kesetaraan gender dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen politik pemerintah Filipina, tetapi juga memberikan harapan kepada masyarakat Bangsamoro untuk masa depan yang lebih inklusif dan aman (Kadir, 2021).

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi selama lebih dari enam puluh tahun di Filipina Selatan, antara pemerintah dan kelompok separatis, menjadikan Mindanao dan Kepulauan Sulu sebagai wilayah yang rawan kekerasan. Pasca-konflik upaya perempuan dalam menjaga perdamaian sangat dibutuhkan. Peran perempuan sangat penting dalam proses mencapai perdamaian dan stabilitas setelah perjanjian. Karena keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah Bangsamoro, mereka juga terlibat dalam membuat organisasi perempuan dalam menjaga perdamaian di wilayah Filipina, upaya pemeliharaan perdamaian diperkuat dan pembangunan yang lebih inklusif. Perempuan sangat penting dalam proses menjaga perdamaian di Bangsamoro, baik di tingkat formal maupun informal, mereka terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang membantu menciptakan stabilitas dan rekonsiliasi setelah konflik. Mediasi konflik, penguatan komunitas, dan partisipasi dalam lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil semua mencakup dari peran perempuan. Peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian perlu dipertahankan dan diakui oleh pemerintah, masyarakat,

dan organisasi internasional. Kebijakan yang mengakui gender, kebijakan yang mendukung inisiatif yang dipimpin oleh perempuan, dan pengakuan publik atas kerja mereka adalah beberapa contoh dari pengakuan ini.

Secara mendalam, penelitian ini membahas konsep keamanan perdamaian perempuan dan pilarnya, yaitu partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Menurut Feminisme, penelitian ini menggambarkan agensi perempuan untuk perdamaian karena menunjukkan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan sendiri. Selanjutnya, WPS berfokus pada peran perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan global, serta pemeliharaan perdamaian setelah konflik, melalui empat pilar WPS, yaitu partisipasi, perlindungan, dan pencegahan. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan yang mendukung peran perempuan dalam perdamaian dapat diterapkan dengan lebih baik.

REFERENSI

- A, B, Adam. (2022). Examining Women's Critical Role in Peacebuilding in the Southern Philippines. USIOP <https://www.usip.org/publications/2022/02/examining-womens-critical-role-peacebuilding-southern-philippines> Diakses pada 31 Mei
- Abdussamad, R. (2021). Metode Penelitian. Syakir Media Press. Hal III. [https://books.google.com/books/about/Metode Penelitian Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ)
- Arino, M. V. (2010, May). *The participation of women in peace processes: The other tables*. International Catalan Institute for Peace. Working Paper 2010. 5 <https://www.cawtarclearinghouse.org/storage/AttachementGender/The%20Participation%20of%20Women%20in%20Peace%20Processes.%20The%20Other%20Tables.pdf>
- Asri, R, P. (2022). Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Sebagai Implementasi *Women, Peace and Security* (WPS) Agenda di Myanmar 96 HI 2022. 253-254 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/37519>
- Berutu, G, A. (2019). SEA MUSLIM MINORITAS: SOUTH THAILAND/PATTANI, SOUTH PHILIPPINES/MINDANAU AND THAILAND. 9-10 <https://osf.io/preprints/osf/cfwvp>
[https://www.researchgate.net/publication/337940572 SEA MUSLIM MINORITAS SOUTH THAILANDPATTANI SOUTH PHILIPPINESMINDANAU AND THAILAND](https://www.researchgate.net/publication/337940572_SEA_MUSLIM_MINORITAS_SOUTH_THAILANDPATTANI_SOUTH_PHILIPPINESMINDANAU_AND_THAILAND)
- Conciliation Resources. (2024). WOMEN'S PEACE AND HUMANITARIAN FUND (WPHF). <https://www.c-r.org/organisation-profile/womens-peace-and-humanitarian-fund-wphf#:~:text=The%20Women's%20Peace%20and%20Humanitarian,civil%20society%20and%20Member%20States>. Diakses pada 24 Juni

- Editorial FES Asia. (2022) The crucial role of Filipino women in the country's road to peace.. FES. <https://asia.fes.de/news/women-in-philippine-peace-process> Diakses pada 25 Juni
- Engelbrecht, G. (2021). Bangsamoro's Potential for Regional Gains. Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/bangsamoros-potential-regional-gains> Diakses pada 24 Juni
- Engelbrecht, G. (2021). The logics of insurgency in the Bangsamoro. Routledge. 3-4 <https://econpapers.repec.org/RePEc:taf:fswixx:v:32:y:2021:i:6:p:887-912>
- Ferrer, M. C. (1997). Peace matters: A Philippine peace compendium. https://books.google.com/books/about/Peace_Matters.html?id=RzuPAAAAMAAJ
- Food and Agriculture Organization. (2023). Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995-2025. <https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC189909/> Diakses pada 22 Juni
- GABRIELA National Alliance of Women. (2024). GABRIELA-NATIONAL ALLIANCE OF FILIPINO WOMEN SOUTHEAST ASIA- PHILIPPINES, INDONESIA, THAILAND, VIETNAM, SINGAPORE, MALAYSIA, CAMBODIA, LAOS. <https://www.onebillionrising.org/41139/gabriela-national-alliance-of-filipino-women-southeast-asia-philippines-indonesia-thailand-vietnam-singapore-malaysia-cambodia-laos/> Diakses pada 27 Juni
- Hammond, J. (2020). Rencana pembangunan Filipina bertujuan untuk menghidupkan kembali wilayah yang porak poranda. <https://ipdefenseforum.com/id/2020/10/rencana-pembangunan-filipina-bertujuan-untuk-menghidupkan-kembali-wilayah-yang-porak-poranda/> Diakses pada 20 Juni
- Ivan. (2012). Ketika itu, telah berlalu oleh waktu. <https://paksejarah.blogspot.com/2011/03/bangsa-moro-di-filipina.html> Diakses pada 5 Juni
- Kadir, B,N. (2021). Peranan Wanita dalam Penyelesaian Konflik di Selatan Filipina (The Role of Women in Conflict Resolution at the Southern Philippines). <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/24882>
- Mahadwartha. (2002). *Interpedensi: Teori Agensi*. <https://scholar.google.co.id/citations?user=YiAdc2AAAAAJ&hl=en>
- Majul, A, Cesar. (2024). Dinamika Islam Filipina. http://catalog.uinsa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1844
- Maligalig, B, Diane Rosary. (2024). WE Act 1325: Six Years of Implementing the Philippine National Action Plan. https://www.mc.edu.ph/Portals/8/Resources/WEAct_1325_PNAP.pdf Diakses pada 1 Juli
- Mcney, L. (2015). The Oxford Handbook of Feminist Theory. OXFORD ACADEMIC. <https://academic.oup.com/edited-volume/34617/chapter-abstract/294770671?login=false#no-access-message> Diakses pada 4 Juli

- Minority Rights Group. (2023). Moro Muslims in the Philippines. <https://minorityrights.org/communities/moro-muslims/> Diakses pada 4 Juli
- Nayong Pilipino Foundation. (2024). Gender and Development. <https://nayongpilipino.gov.ph/gender-and-development/> Diakses pada 1 Juli
- OSAGI. (2024). Landmark resolution on Women, Peace and Security. <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/>
- Philippine Commission on Women. (2024). Philippine Commission on Women (PCW). <https://www.devex.com/organizations/philippine-commission-on-women-pcw-111422> Diakses pada 13 Juni
- Queensland, T. U. (2023). Thinking like a social scientist. Australia: Internasional Creative Commons Attribution. <https://www.publications.qld.gov.au/dataset/6762fbd7-0420-49bd-95bb-fa2cc844a5e2/resource/912334aa-9152-43a3-8278-381e18f21aca/download/agtech-roadmap-20232028.pdf>
- Ramon Magsaysay Award Foundation. (2023). Coronel-Ferrer, Miriam. <https://www.rmaward.asia/awardee/miriam-coronel-ferrer> Diakses pada 13 Juni
- Reilly'O, M. (2015). Creating Political Will for Women in Peace: Video Interview with Irene Santiago. <https://theglobalobservatory.org/2015/04/irene-santiago-women-peacekeeping/> Diakses pada 27 Juni
- Reilly'O, M. (2015). Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies. Inclusive Security. <https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies/> Diakses pada 27 Juni
- Reskianti. (2014). NEGARA DAN RESOLUSI KONFLIK (STUDI TERHADAP KONFLIK BANGSAMORO DI MINDANAO FILIPINA SELATAN). 1 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3824/>
- R, Sharaee, Gabito, L, S. (2022). THE ROLE OF THE PHILIPPINE COMMISSION ON WOMEN (PCW) AND GABRIELA PARTY-LIST GROUP IN ERADICATING VICTIM BLAMING ON SOCIAL MEDIA. Philippine E-Journals. <https://ejournals.ph/article.php?id=17197>
- Santiago, M, I. (2015). THE PARTICIPATION OF WOMEN IN THE MINDANAO PEACE PROCESS. UN WOMEN. https://www.yunbaogao.cn/index/partFile/5/unwomen/2022-03/5_22055.pdf
- Tiyakap Kalilintad. (2024). Respect Life Respect Rights. <https://code-ngo.org/wp-content/uploads/2021/06/TKI-Presentation.pdf> Diakses pada 3 Juli
- UNFPA. (2024). *Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (BARMM). <https://philippines.unfpa.org/en/topics/bangsamoro-autonomous-region-muslim-mindanao-barmm> Diakses pada 3 Juni
- UN Women. (2012). Women's participation in peace negotiations: Connections between presence and influence (2nd ed). Retrieved May 12, 2020, from <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/10/WPSsourcebook-03A-WomenPeaceNegotiations-en.pdf> Diakses pada 10 Juni
- UN Women. (2021). Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF). <https://iraq.unwomen.org/en/what-we-do/women-peace-and-humanitarian-fund-0>

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03AWomenPeaceNeg.pdf>
Diakses pada 10 Juni

UnYPhil-Women, Inc. (2024). Who We Are.
<https://unyphilwomen.wordpress.com/about/> Diakses pada 7 Juni

Women's Peace & Humanitarian. (2023). WPHF is strengthening the capacity of civil society organizations in the Philippines working at the forefront of peace, security and humanitarian action — promoting women's meaningful participation in conflict prevention and response, and supporting them in the registration process as legal entities in the country. <https://wphfund.org/countries/philippines/> Diakses pada 18 Juni

Women's Peace Security. (2024). Nisa Ul Haqq fi Bangsamoro (Women for Justice in the Bangsamoro). <https://wps.asean.org/organization/nisa-ul-haqq-fi-bangsamoro-women-for-justice-in-the-bangsamoro/>